

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek krusial dalam pembangunan karena mencerminkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting dalam menganalisa keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Salah satu tolok ukur esensial dalam mengevaluasi kinerja perekonomian suatu wilayah adalah melalui analisis pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut (Marcal et al., 2024).

Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai evolusi aktivitas ekonomi dari periode ke periode, yang berujung pada peningkatan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi suatu negara. Ada beberapa cara untuk mengukurnya, seperti melihat nilai PDB, investasi, inflasi, pendapatan pajak daerah, jumlah pinjaman, dan kualitas layanan ekonomi.

Secara konsep, pertumbuhan ekonomi terjadi perubahan kondisi perekonomian suatu negara dan berkesinambungan untuk mewujudkan keadaan ekonomi yang lebih baik selama periode tertentu (Arini & Kusuma, 2019). Kondisi perekonomian suatu daerah memiliki keterkaitan erat dengan kondisi perekonomian regional, nasional, maupun global.

Terdapat beberapa faktor ekonomi yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh daerah tersebut, seperti kebijakan pemerintah pusat. Kondisi perekonomian global juga dapat memberikan pengaruh, misalnya krisis keuangan global atau

fluktuasi harga minyak dunia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi daerah memegang peranan penting dalam prinsip otonomi daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta mengelola perekonomiannya sendiri. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diperlukan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola wilayah.

Menurut Kementerian Keuangan RI, pertumbuhan yang stabil berkat kebijakan yang tepat. Sepanjang tahun 2024 perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil. Dengan tercermin pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,1%, meningkat 0,1% dari tahun sebelumnya sebesar 5,0%. Stabilitas ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif.

Implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran membuat pendapatan negara yang optimal dan efisiensi belanja yang baik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Dibentuknya otonomi daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada setiap daerah sehingga pembangunan antara pusat dan daerah dapat berjalan selaras dan seimbang. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri dengan minimal intervensi dari pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi aspek krusial dalam perkembangan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal, serta mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.

Desentralisasi merupakan kebijakan pelimpahan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengatur sumber-sumber daerah berupa pengeluaran dan penerimaan daerah. Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan guna memunculkan potensi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh dari berbagai sumber dalam wilayah dan penerimaan dana perimbangan, yaitu: 1) dana alokasi umum (DAU); dan 2) dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, pengeluaran daerah terutama digunakan untuk belanja modal yang mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Pengelolaan anggaran (APBD) yang berbasis kinerja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan anggaran. Hal ini pada gilirannya akan memengaruhi kapasitas pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang berbeda dengan memperhatikan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Pulau Madura yang terdiri dari empat kabupaten, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik ekonomi sendiri. Pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Madura dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan

dinamika yang menarik. Masing-masing kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki sektor unggulan yang berbeda, seperti pertanian tembakau di Pamekasan, perikanan dan wisata di Sumenep, industri UMKM dan logistik di Bangkalan, serta pertanian dan peternakan di Sampang.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten di Madura dalam beberapa tahun terakhir cenderung berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkisar 4–5% per tahun pasca pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas wilayah belum sepenuhnya menghasilkan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, Pulau Madura telah terintegrasi dengan wilayah inti pertumbuhan melalui pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura dengan Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi regional. Secara konseptual, konektivitas tersebut seharusnya memberikan dampak positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Madura. Namun secara empiris, pertumbuhan ekonomi kabupaten-kabupaten di Madura masih relatif lebih rendah dan cenderung fluktuatif dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

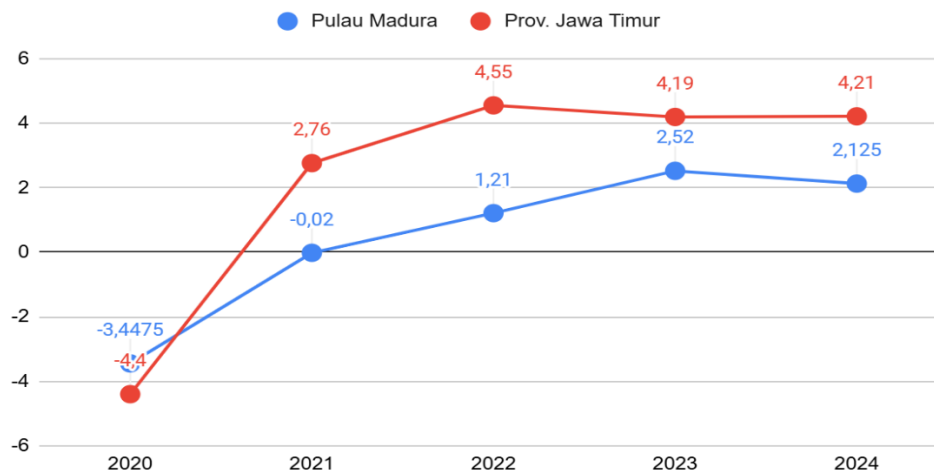
Struktur perekonomian Madura yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian dan perikanan menunjukkan bahwa transformasi struktural ekonomi belum berkembang secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan teoritis dan realitas empiris.

Pemerintah daerah telah merespons potensi ini melalui kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk mendorong sektor-sektor unggulan tersebut. Namun, fenomena yang muncul adalah hasil pertumbuhan yang belum merata

antarwilayah. Misalnya, Sumenep berkembang pesat, sementara Sampang masih menghadapi tantangan struktural dan sosial.

Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas arah kebijakan yang ada apakah sudah sesuai dengan potensi lokal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi perekonomian, data menunjukkan laju pertumbuhan PDRB di Madura mengalami fluktuasi dan masih dibawah rata-rata Jawa Timur.

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Madura dalam persen (%)



Sumber: BPS, data diolah 2025

Berdasarkan gambar 1.1, capaian pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten di pulau madura relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten di jawa timur. Meskipun setiap tahun selama lima tahun terakhir angkanya cenderung meningkat pada tahun 2024 rata-rata mencapai 2.12 persen. Fenomena ini mengindikasi perlunya intervensi kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Madura agar dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi. Kesenjangan pertumbuhan terjadi selama beberapa tahun menunjukkan perlunya

perhatian khusus terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama untuk daerah seperti Pulau Madura yang cenderung tertinggal.

Pulau Madura memiliki letak yang relatif dekat dengan pusat perekonomian Jawa Timur yakni Surabaya, tetapi perekonomian Madura masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar pertumbuhan ekonomi di Madura masih menghadapi berbagai tantangan.

Ketergantungan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan membuat ekonomi Madura rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim, harga pasar serta krisis global. Selain itu, ketimpangan pembangunan infrastruktur dan akses transportasi yang belum merata menyebabkan terhambatnya mobilitas barang dan jasa.

Kesenjangan antara Pulau Madura dan wilayah utama Jawa Timur memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah. Meskipun terdapat pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Madura dan Ibukota Jawa Timur, Surabaya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Madura masih belum optimal. Kesenjangan ekonomi antar kabupaten di Madura berada pada kategori sedang, namun kecenderungan peningkatan disparitas perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.

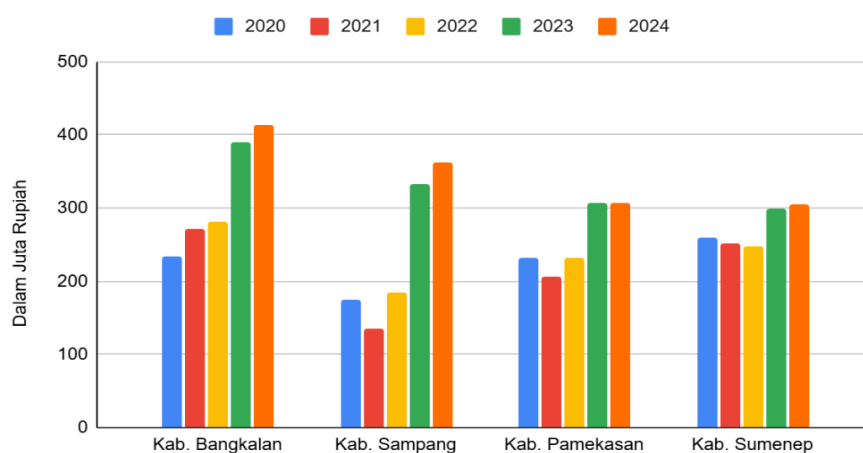
Pemerintah dalam hal ini dituntut untuk mencari solusi atas permasalahan pertumbuhan ekonomi Pulau Madura. Keputusan untuk menerapkan desentralisasi fiskal mengharuskan adanya peningkatan ekonomi di daerah, karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah "*money follows function*".

Prinsip ini menekankan pada fungsi utama pelayanan publik di daerah, yang didukung oleh pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pendapatan daerah.

Kapabilitas suatu wilayah dalam menyalurkan sumber daya daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola potensi ekonomi. Pemerintah daerah harus mengkomodir dalam usaha peningkatan pelayanan publik dan berbagai industri yang sedang berkembang menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk mencapai kemandirian daerah sesuai prinsip dasar desentralisasi fiskal.

Secara keseluruhan, tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di empat kabupaten di Pulau Madura, berdasarkan rata-rata, masih berada dalam kategori "kurang" dan "sangat rendah" (Sakinah & Satriawan, 2021). Salah satu permasalahan yang ada adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Madura masih rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil.

Gambar 1.2 Grafik Pendapatan Asli Daerah Wilayah Pulau Madura Dalam Juta Rupiah



Sumber: BPS, data diolah 2025

Berdasarkan gambar 1.2, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep secara umum, PAD semua kabupaten mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2024, meskipun ada fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Kabupaten Bangkalan dan Sumenep cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sampang dan Pamekasan.

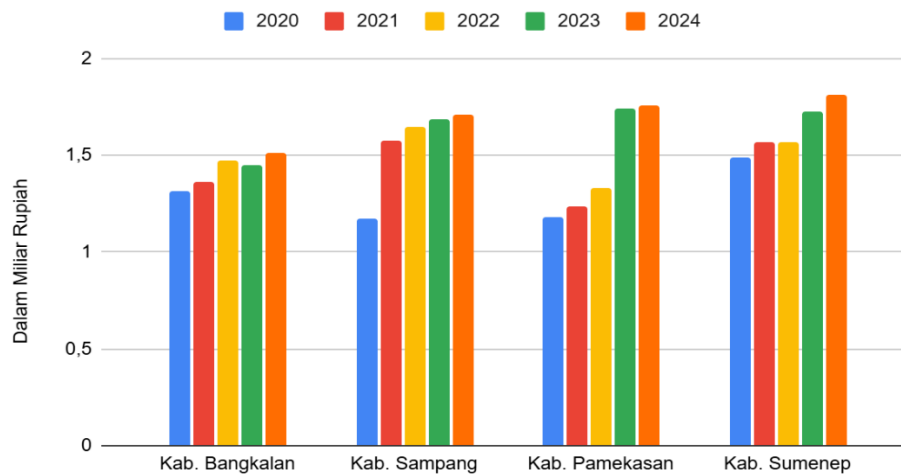
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan daerah ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan transfer yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari pendapatan transfer ini adalah untuk membantu pengelolaan keuangan dan membiayai otonomi daerah, yang merupakan langkah dalam mewujudkan desentralisasi.

Dalam rangka menerapkan asas desentralisasi, pemerintah pusat akan memberikan wewenang, kebebasan, dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk dalam hal penerimaan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Namun, pemerintah pusat tidak sepenuhnya melepaskan pemerintah daerah tanpa dukungan. Sebaliknya, pemerintah pusat tetap memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan (Qomariyahti & Hermanto, 2017).

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Menurut (Ferdiansyah et al., 2018), dana perimbangan bertujuan untuk menutupi kesenjangan fiskal dan meratakan kemampuan fiskal

antar daerah, guna mendukung kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat. Perkembangan Dana Perimbangan di wilayah Pulau Madura dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 1.3 Grafik Dana Perimbangan Wilayah Pulau Madura dalam Miliar Rupiah



Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.3 menampilkan data Dana Perimbangan untuk empat kabupaten di Pulau Madura selama periode lima tahun. Terlihat bahwa Kabupaten Bangkalan menerima Dana Perimbangan tertinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya, dengan tren yang relatif stabil selama periode tersebut. Selanjutnya Kabupaten Sampang berada di posisi kedua dan diikuti Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Secara keseluruhan, terdapat pola konsisten dalam distribusi Dana Perimbangan dari tahun ke tahun, dengan sedikit fluktuasi di beberapa periode.

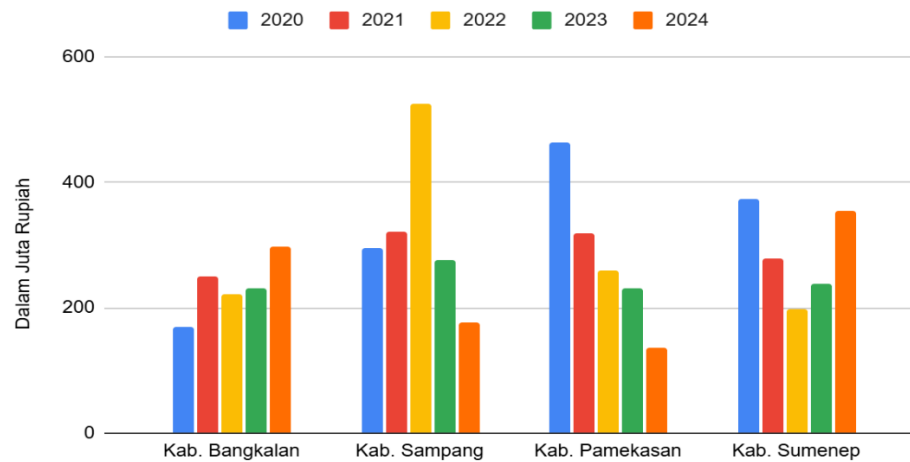
Adanya variasi dalam jumlah dana yang diterima oleh masing-masing kabupaten setiap tahunnya mengindikasikan adanya penyesuaian alokasi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal

nasional, prioritas pembangunan daerah, atau kinerja penyerapan anggaran di masing-masing kabupaten. grafik dana perimbangan menunjukkan bahwa keempat kabupaten sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Dana ini diberikan dalam jumlah miliaran rupiah setiap tahunnya, dan terlihat lebih besar dibandingkan PAD masing-masing daerah. Artinya, sebagian besar pengeluaran dan pembiayaan pembangunan di Madura masih ditopang oleh dana dari pusat, bukan dari kekuatan ekonomi lokal. Ketergantungan ini menggambarkan bahwa ekonomi daerah masih belum mandiri dan belum mampu berdiri di atas kaki sendiri

Selanjutnya, Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal mencakup pengeluaran yang menghasilkan aset berwujud seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, serta aset tidak berwujud seperti perangkat lunak. Perkembangan belanja modal wilayah Pulau Madura seperti grafik berikut:

Gambar 1.4 Grafik Belanja Modal Wilayah Pulau Madura



Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.4, capaian belanja modal Pulau Madura yang telah disajikan, dapat diobservasi tren alokasi belanja modal pada di Pulau Madura selama lima tahun terakhir. Analisis terhadap data menunjukkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam pola alokasi belanja modal antar kabupaten di wilayah Madura. Kabupaten Sumenep memiliki alokasi belanja modal tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Bangkalan dengan tren yang stabil. Kabupaten Pamekasan menunjukkan pola fluktuatif namun meningkat, sementara Kabupaten Sampang mencatat belanja modal terendah meskipun mengalami tren kenaikan..

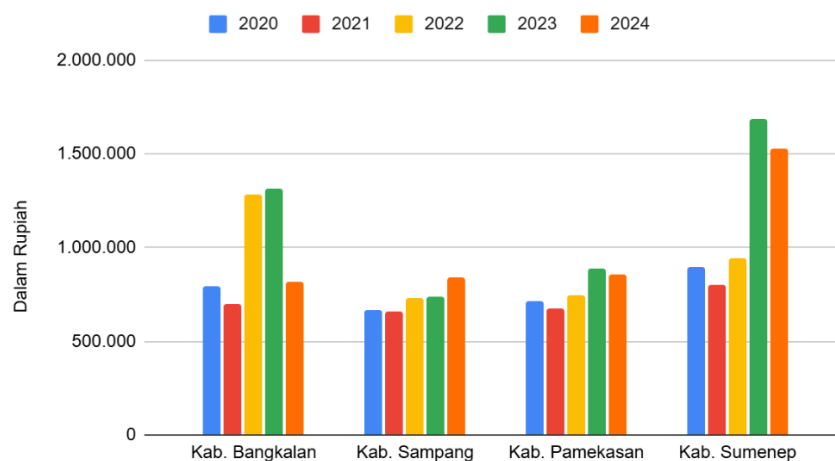
Grafik mengenai belanja modal memperlihatkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal di Pulau Madura juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Belanja modal merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang berkelanjutan. Rendahnya belanja modal menunjukkan bahwa investasi pemerintah daerah dalam pembangunan jangka panjang masih terbatas, yang pada akhirnya dapat

memengaruhi kualitas layanan publik, daya saing wilayah, dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan

Selain komponen yang ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terdapat Konsumsi Rumah Tangga yang dapat dikaitkan sebagai pendorong pertumbuhan penduduk. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Dalam teori ekonomi makro, konsumsi rumah tangga berkontribusi signifikan terhadap total permintaan agregat.

Kebijakan ekonomi yang mendorong daya beli masyarakat, seperti subsidi, insentif pajak, dan peningkatan upah minimum, dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dapat dilihat pada grafik konsumsi rumah tangga berikut.

Gambar 1.5 Grafik Konsumsi Rumah Tangga Wilayah Pulau Madura

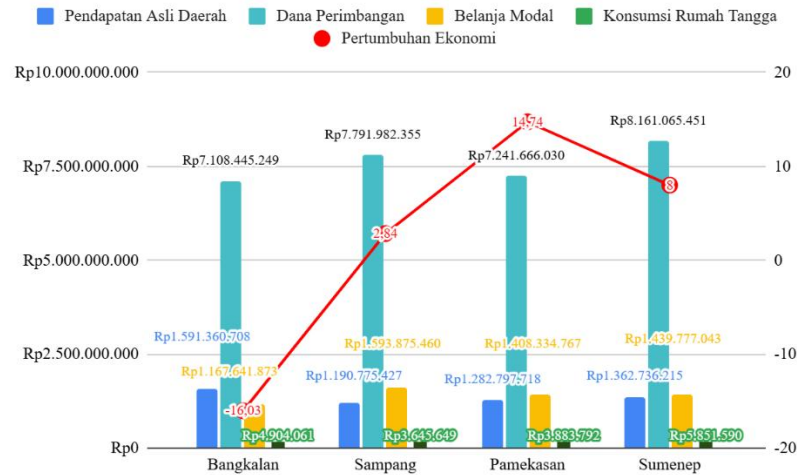


Sumber: BPS, data diolah

Berdasarkan gambar 1.5, capaian konsumsi rumah tangga wilayah kabupaten di pulau madura relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten di jawa timur , dapat dianalisis pola konsumsi rumah tangga per kapita di empat kabupaten yang membentuk wilayah administratif Pulau Madura. menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam tingkat konsumsi rumah tangga antar kabupaten. Kabupaten Sumenep teridentifikasi sebagai wilayah dengan tingkat konsumsi rumah tangga tertinggi, menunjukkan indikasi daya beli masyarakat yang relatif superior dibandingkan kabupaten lainnya di Pulau Madura.

Kabupaten Pamekasan menempati posisi kedua dengan tren konsumsi yang menunjukkan peningkatan gradual selama kurun waktu observasi, mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bertahap. Sementara itu, Kabupaten Bangkalan memperlihatkan tingkat konsumsi rumah tangga pada posisi ketiga dengan pola yang relatif stabil meskipun dengan tendensi meningkat pada tahun-tahun terakhir. Kabupaten Sampang tercatat memiliki tingkat konsumsi rumah tangga terendah di antara empat kabupaten di Pulau Madura, yang mengindikasikan kondisi sosio-ekonomi masyarakat yang relatif menurun.

Gambar 1.6 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Madura Dalam Miliar Rupiah dan Persen Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, data diolah

Grafik tersebut menunjukkan perbandingan empat indikator ekonomi utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Konsumsi Rumah Tangga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada empat kabupaten di Pulau Madura: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Meskipun Kabupaten Bangkalan memiliki PAD tertinggi sebesar Rp1,59 triliun, daerah ini justru mengalami pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu 16,03%. Sebaliknya, Pamekasan dan Sumenep mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi masing-masing sebesar 14,74% dan 8%, meskipun PAD mereka tidak sebesar Bangkalan. Sampang berada di posisi tengah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,84%.

Data ini menunjukkan bahwa tingginya PAD atau dana perimbangan tidak selalu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Faktor lain seperti efektivitas belanja modal serta konsumsi rumah tangga kemungkinan

memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Tingkat konsumsi rumah tangga di masing-masing kabupaten tidaklah seragam. Kabupaten dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi dapat mengindikasikan tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik, tingkat urbanisasi yang lebih tinggi, atau struktur ekonomi yang lebih beragam. Sebaliknya, kabupaten dengan tingkat konsumsi yang lebih rendah dapat mengindikasikan adanya permasalahan struktural seperti tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, atau aksesibilitas yang terbatas terhadap barang dan jasa.

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang karakteristik, pola dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ismail et al. (2023) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terkait Konsumsi Rumah Tangga, penelitian Rahayu (2020) menjelaskan Pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun pada penelitian Indayah et al (2024) menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga secara parsial berpengaruh negative dan sig. bagi pertumbuhan ekonomi.. Pada penelitian Darmawan (2021) menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada penelitian Zulvan et al. (2024) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak Berpengaruh.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa ketika kapasitas ekonomi daerah meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan terdorong secara signifikan. Namun, kondisi yang terjadi di Pulau Madura menunjukkan fenomena

yang berbeda. Meskipun telah terjadi pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang berkembang, pertumbuhan ekonomi di Madura masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah utama di Jawa Timur. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi secara khusus menyoroti konteks Pulau Madura dengan karakter sosial dan ekonomi yang khas.

Berbedanya beberapa hasil penelitian terdahulu tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan untuk menegaskan dan menambahkan informasi tentang struktur, pola dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, khususnya di wilayah pulau madura. Selain itu, terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten di pulau madura menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga peneliti tertarik meneliti tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Madura.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, dapat diurai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?
2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Madura?

3. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?
4. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Pulau Madura?
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?
4. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura?

1.4. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, peneliti perlu menetapkan ruang lingkup yang jelas untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Penelitian ini meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Madura dengan menggunakan data sekunder periode 2020-2024.

Variabel yang digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Konsumsi Rumah Tangga sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada teori ekonomi daerah dengan menganalisis hubungan antara sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi Pulau Madura, serta memperkaya literatur tentang desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi pemerintah Pulau Madura untuk memilih arah kebijakan dalam peningkatan pertumbuhan yang tepat agar lebih efektif dan optimal dalam alokasi anggaran.

Penelitian ini menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terkait topik serupa dalam bidang ekonomi pembangunan dan keuangan daerah khususnya daerah Pulau Madura.